

Abstraksi

Kementerian Keuangan mendirikan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola kekayaan negara. DJKN mempunyai tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi dalam hal kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Penyelesaian Piutang Negara adalah salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar efektif dan efisien. Penulisan karya tulis ini dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan kendala yang dihadapi serta solusi. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif yang dimulai dengan pengumpulan data yang akan dianalisis kemudian ditarik sebuah kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang sudah diperoleh bahwa sistem penagihan Piutang Negara yang dilakukan oleh KPKNL Medan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06.2016.

Kata Kunci: Piutang Negara, PUPN, KPKNL.

Abstract

The Ministry of Finance established the Directorate General of State Assets (DJKN) in managing state assets. DJKN has the task of formulating and implementing policies and standardization in terms of state assets, state receivables and auctions. Settlement of State Receivables is one of the important aspects of state financial management that requires special attention to be effective and efficient. The writing of this paper is carried out to find out the process of settling State Receivables carried out by the State Receivable Affairs Committee (PUPN) and the obstacles faced and solutions. The method used in this analysis is a descriptive method which begins with collecting data to be analyzed then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the research that have been obtained are that the State Receivables collection system carried out by the Medan KPKNL is carried out based on the Regulation of the Minister of Finance Number 240/PMK.06.2016.

Keyword: State Receivables, PUPN, KPKNL.